PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Sekretariat SDGs

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Lokakarya *Kick Off* Nasional Program PPSP Tahun 2018
Jakarta , 13 Maret 2018

KERANGKA PAPARAN

1. PENDAHULUAN
2. PEDOMAN TEKNIS TPB/SDGs
3. DUKUNGAN PENYEDIAAN DATA DAN INDIKATOR
4. PROSES PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

1. PENDAHULUAN

1. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi penyusunan berbagai dokumen terkait kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah.
2. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs merupakan rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat pusat perlu disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga.

Dokumen TPB/SDGs

Kementerian PPN/ Bappenas

12 bulan setelah Perpres berlaku (Juli 2018)

- Dokumen rencana strategis pencapaianTPB/ SDGs tahun 2016-2030

Peta Jalan SDGs

6 bulan setelah Perpres berlaku (Januari 2018)

Rencana Aksi Nasional

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional

12 bulan setelah Perpres berlaku (Juli 2018)

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah

Rencana Aksi Daerah

2. PEDOMAN TEKNIS TPB/SDGs

Kementerian PPN/ Bappenas

1. Terjemahan Tujuan & Target dalam Bahasa Indonesia
2. Pedoman Penyusunan Renaksi
3. Ringkasan Metadata
4. Metadata setiap pilar

Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Kementerian PPN/ Bappenas

Tujuan:

- ✓ Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi TPB, sehingga dihasilkan produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional

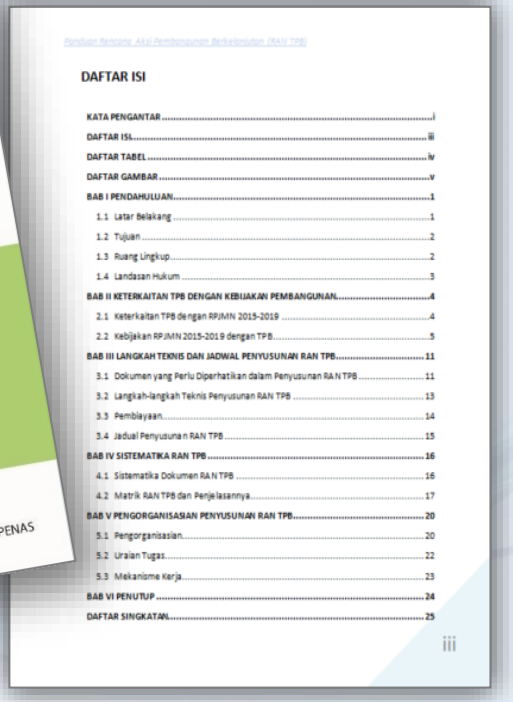

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Landasan Hukum 3
BAB II KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 4
2.1 Keterkaitan TPB dengan RPJMN 2015-2019 4
2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB 5
BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAN TPB 11
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAN TPB 11
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAN TPB 13
3.3 Pembiayaan 14
3.4 Jadual Penyusunan RAN TPB 15
BAB IV SISTEMATIKA RAN TPB 16
4.1 Sistematika Dokumen RAN TPB 16
4.2 Matrik RAN TPB dan Penjelasannya 17
BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAN TPB 20
5.1 Pengorganisasian 20
5.2 Uraian Tugas 22
5.3 Mekanisme Kerja 23
BAB VI PENUTUP 24
DAFTAR SINGKATAN 25

iii

Sistematika Dokumen RAN

Kementerian PPN/ Bappenas

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Permasalahan dan Tantangan

BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs

1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator SDGs
2. Kebijakan (uraian per Tujuan)
3. Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan)

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Tanggung Jawab Masing-masing Platform
4. Waktu Pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Perpres Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
2. Lampiran 2. Format Matriks RAN SDGs
3. Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator SDGs

3. DUKUNGAN PENYEDIAAN DATA DAN INDIKATOR

Kementerian PPN/ Bappenas

Pengembangan Database

mengelola lebih dari 241 indikator

Disagregasi Indikator

gender, kelompok umur, lokasi geografis, tingkat pendapatan, disabilitas, status migrasi, etc

Pemetaan Goal, Target, & Indikator

Kementerian PPN/ Bappenas

SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

1 TANPA KEMISKINAN	7 Target, 12 Indikator
2 TANPA KELAPARAN	8 Target, 14 Indikator
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	13 Target, 26 Indikator
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	10 Target, 11 Indikator
5 KESETARAAN GENDER	9 Target , 14 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	5 Target, 6 Indikator
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	12 Target, 17 Indikator
9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	8 Target, 12 Indikator
10 BERKURANGNYA KESENJANGAN	10 Target,11 Indikator
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	19 Target, 25 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	8 Target, 11 Indikator
11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	10 Target, 15 Indikator
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	11 Target, 13 Indikator
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	5 Target, 7 Indikator
14 EKOSISTEM LAUTAN	10 Target, 10 Indikator
15 EKOSISTEM DARATAN	12 Target, 14 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	12 Target, 23 Indikator

Pemetaan Indikator Global

Kementerian PPN/ Bappenas

241 Indikator Global

	Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola
85	Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global	40	27	13	5
76	Indikator Nasional yang memiliki proksi & akan dikembangkan	13	19	31	13
75	Indikator Global yang akan dikembangkan	24	25	22	4
5	Indikator Global yang tidak relevan untuk Indonesia	0	0	4	1

Pemetaan Indikator SDGs Indonesia

Kementerian PPN/ Bappenas

319 Indikator Nasional

85 Indiaktor Nasional yang sesuai dengan Indikator Global

- 40 Pilar Sosial
- 27 Pilar Ekonomi
- 13 Pilar Lingkungan
- 5 Pilar Hukum dan Tata Kelola

166 Indiaktor Nasional sebagai proksi indikator global

- 26 Pilar Sosial
- 56 Pilar Ekonomi
- 64 Pilar Lingkungan
- 20 Pilar Hukum dan Tata Kelola

68 Indikator Nasional sebagai tambahan indikator global

- 45 Pilar Sosial
- 8 Pilar Ekonomi
- 6 Pilar Lingkungan
- 9 Pilar Hukum dan Tata Kelola

319 TOTAL

- 111 Pilar Sosial
- 91 Pilar Ekonomi
- 83 Pilar Lingkungan
- 34 Pilar Hukum dan Tata Kelola

FUNGSI METADATA SDGS

Kementerian PPN/ Bappenas

1. Acuan penyusunan Peta Jalan, RAN, RAD TPB/SDGs dibutuhkan persepsi yang sama tentang Tujuan, Target & Indikator TPB/ SDGs.

2. Mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB/ SDGs diperlukan Definisi Operasional (DO) untuk tiap indikaztor TPB/ SDGs.

3. Dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta keterbandingan pencapaian TPB/ SDGs antarnegara dan antardaerah di Indonesia.

4. Beberapa DO dari MDGs masih tetap dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/ SDGs, sedangkan beberapa DO yang baru perlu dirumuskan dan disepakati bersama.

Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs

Penjabaran Goal dan Target ke dalam Indikator:

a. Nama Indikator;
b. Konsep dan Definisi;
c. Cara Menghitung;
d. Manfaat;
e. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data;
f. Disagregasi Data; serta
g. Frekuensi Pengumpulan Data.

Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Tujuan 6.

Kementerian PPN/ Bappenas

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TUJUAN 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TUJUAN 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

TARGET 6.1

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

INDIKATOR 6.1.1.(a)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

KONSEP DAN DEFINISI

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P\ AML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya.

MANFAAT

Memantau akses penduduk terhadap sumber air layak (*improved drinking water*) berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Indikator ini merupakan indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan 7.1 MDGs.

Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman dan berkelanjutan (*safe and affordable drinking water*) secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030. Hal ini disebabkan karena air yang tidak aman (tidak berkualitas) merupakan penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, dan

Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Tujuan 11.

Kementerian PPN/ Bappenas

11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN

TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN

TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

TARGET 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

INDIKATOR 11.1.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
   a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, seng, dan bambu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PHLT : Proporsi rumah tangga hunian layak dan terjangkau
JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau
JRT : Jumlah rumah tangga

MANFAAT

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei ekonomi sosial nasional (Susenas) kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan.

4. PROSES PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGS

Kementerian PPN/ Bappenas

Langkah 1:
Menetapkan Tim Koordinasi termasuk Kelompok Kerja (Pokja)

Langkah 2:
Melakukan sidang pleno tata cara penyusunan Renaksi

Langkah 3:
Masing-masing pokja menyusun draf-1 Renaksi

Langkah 4:
Masing-masing pokja membahas draf-2 Renaksi

Langkah 5:
Pleno penyempurnaan Draf Final

Langkah 6:
Penyempurnaan Draf Final Renaksi oleh Tim Koordinasi

Langkah 7:
Pengesahan Renaksi oleh Menteri/Kepala Daerah

Langkah 8
Sosialisasi & fasilitasi Renaksi

Dokumen Rujukan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

1. RPJMN/D periode berjalan
2. Renstra K/L/OPD periode berjalan
3. RKP/D tahun terakhir
4. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Laporan Pencapaian MDGs
6. Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait

Contoh Matrik Renaksi TPB/SDGs

Kementerian PPN/ Bappenas

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)				Instansi Pelaksana (5)
			2016	2017	2018	2019	

BAG 1

TARGET DAN INDIKATOR TPB

Nama Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019			
PROGRAM PEMERINTAH									
INDIKATOR 1									
PROGRAM 1									
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan								
	1.2. Indikator Kegiatan								
Kegiatan 2	2.1. Indikator Kegiatan								
	2.2. Indikator Kegiatan								

BAG 2

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH

Nama Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
INDIKATOR TPB 1:										
PROGRAM 1 :										
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan:									
	1.2 Indikator Kegiatan:									
Kegiatan 2:	2.1 Indikator Kegiatan:									
	2.2 Indikator Kegiatan:									

BAG 3

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH NON PEMERINTAH

Contoh Pengisian Matrik Renaksi
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak -(1)

Kementerian PPN/ Bappenas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor, BPS	%	70,97	71,14a	72,04a	92	100
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	m3/detik	58,41/6,97	64,56/6,15a	84,3/11,3a	97,08/12,78	118,6/21,52
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor, BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS	%	-	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	%	62,14	67,2a	67,89	79,07	85
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kementerian Kesehatan	desa/ kelurahan	26.417	33.803a	35.000	40.000	45.000
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kementerian Kesehatan	desa/ kelurahan	PM	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten/ Kota (Skala Kota)	2	2a	2a	9	9

Contoh Pengisian Matrik Renaksi
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak -(2)

Kementerian PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
INDIKATOR: 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Regional	SR	1 (kawasan)*	300 (ltr/detik)*	750 (ltr/detik)*	280,000	240,000	124,885.40	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kawasan	SR	237 (IKK)*	3,184 (ltr/detik)*	3,078 (ltr/detik)*	3,200,000	2,728,000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan	SR				1,160,000	1,148,800		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Perdesaan berbasis masyarakat	SR	1,449 (Desa)*	-	3,660 (desa)*	2,560,000	2,978,560		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.5. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan	SR	246 (Kawasan)*	351 (Kawasan)*	40 (kawasan)* & 234 (ltr/detik)*	152,000	221,600		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.6. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan nelayan	SR				15,990	21,027		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.7. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar	SR				352,000	409,280		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	70.97*	71.14*	72.04*	94	100	128	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Contoh Pengisian Matrik Renaksi
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Layak -(1)

Kementerian PPN/ Bappenas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	PM	PM	PM	PM	100
11.1.1.(b).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan	PM	3	3	3	2
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang & Kota Baru	PM	8 & 5	8 & 5	8 & 5	8 & 5
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a).	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Kementerian Perhubungan	%	24	26	28	30	32
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Besar	3	5	7	7	10
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a).	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang	43 kota belum optimal perannya (2014)	5	10	15	20 Kota dioptimalkan perannya
11.3.1.(b).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Metropolitan baru	2 (2014)	2	3	3	3

Contoh Pengisian Matrik Renaksi
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Layak -(2)

Kementerian PPN/ Bappenas

TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
INDIKATOR: 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengembangan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.1. Jumlah rumah tangga (RT) berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Tapak dan Sarusun (temasuk sewa beli)	RT	130,000	175,000	225,000	250,000	120,000	1,049.4	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah rumah tapak yang mendapat fasilitas Kredit Konstruksi	RT	0	1,000	1,500	2,000	1,500		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Swadaya	RT	0	50,000	150,000	200,000	50,000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan uang muka	RT	55,000	106,500	124,250	124,370	65,880		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM 2: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	1.1. Luas kawasan kumuh perkotaan	Ha	1,610	8,975	9,956	9,500	8,390	46,448,000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	1,477	1,483	1,633	1,620	1,470			

TERIMA KASIH

Kementerian PPN/ Bappenas

- **Alamat Kontak:**
- **Website** : http://www.sdgs.bappenas.go.id/
- **Facebook** : SDGsIndonesia
- **Twitter** : @SDGs_Indonesia
- **Email** : sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
- **Telepon** : Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
- (021-392 6254) dan Sekretariat SDGs (021-579 45716)

LAMPIRAN DAFTAR INDIKATOR TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Indikator global yang akan dikembangkan.

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

LAMPIRAN DAFTAR INDIKATOR TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	Indikator global yang akan dikembangkan.

KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGETC	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator global yang akan dikembangkan.

KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.1 *	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.